

# Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

---

## PENDAMPINGAN SOSIAL MASYARAKAT KONSUMTIF MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF

**Yous Gunawan**

Stai Hubbulwathan Duri

Email: yosgunawan90@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pendamping sosial mampu merubah pola hidup penerima manfaat dari budaya konsumtif kepada budaya produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan dua Teknik yakni wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian dilaksanakan dengan dua cara yakni pertama dengan rutin melakukan pertemuan yang disebut pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2), dalam pertemuan yang dilaksanakan harus mengacu pada modul diantaranya modul pengelolaan keuangan pengelolaan usaha (PKPU) yang isinya adalah bagaimana mengelola keuangan dengan rutin menabung, menyisihkan uang bantuan untuk modal usaha dan menjalin kerjasama kelompok membuat usaha bersama. Kedua, kementerian sosial melalui pendamping sosial memberikan peluang pelatihan kelompok usaha bersama dan usaha mandiri bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dengan cara mengarahkan mereka untuk mendapatkan pelatihan misalnya Pena (pahlawan ekonomi nasional), usaha kelompok modal bersama dan membuat proposal kepada pemerintah daerah sebanyak 10 orang dan kemudian dilatih dan diberikan modal serta dibimbing untuk menjadi mandiri dan produktif.*

**Kata kunci :** Pendamping Sosial, Budaya Konsumtif, Budaya Produktif

### **Abstract**

*Study This aim For see How social assistance capable change pattern life recipient benefit from culture consumptive to culture productive. Research methods used \_ is qualitative descriptive. Data collection uses two techniques, namely interviews and documentation. results study held in two ways ie First with routine do so- called meeting meeting enhancement capacity family (P2K2), in meetings held \_ must refers to the module among them module management financial management business (PKPU) whose contents is How manage finance with routine save , set aside aid money for business capital and establishing cooperation group make business together . Second, ministry social through companion social give opportunity training group business together and effort independent for family recipient benefits (KPM) with method direct they For get training for example Pena (hero economy national), business joint capital group and make a proposal to government area as many as 10 people and then trained and given capital as well guided For become independent and productive.*

**Keywords:** Social Assistance, Consumptive Culture, Productive Culture

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk dihilangkan sudah banyak upaya dan program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia guna menanggulangnya. Upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari masa Orde Baru sampai pada masa Era Reformasi (Haris, 2019). Pada Era Orde Baru ada beberapa program yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan seperti program Jaringan Pengamanan Sosial atau dikenal dengan istilah JPS yang meliputi pertama Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), kedua Program Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan yang ketiga adalah program Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra) namun kebijakan program pemerintah ini tidak berjalan lancar disebabkan program ini tidak mampu memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pemerintah melihat dan menganalisa hasil dari program pemberdayaan masyarakat miskin yang telah dilaksanakan pada masa Orde Baru, maka pada masa Orde Reformasi pemerintah Kembali merumuskan bagaimana kemiskinan di Indonesia bisa minimal berkurang dengan merujuk pada bantuan yang seharusnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang mana hal ini sesuai peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Bercermin dari negara luar yang dikenal dengan Program Conditional Cash Transfer (CCT) maka tahun 2007 pemerintah Indonesia melaksanakan program bantuan tunai bersyarat (BTB) yang sampai sekarang program ini masih berjalan yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan yang memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui PT. POS dengan proses pendampingan yang berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajiban bagi Rumah Tangga Sangat Miskin yakni berupa mengikuti aturan dari program sehingga dengan itu bantuan atau hak bisa mereka dapatkan. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka serta memutuskan rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan seperti perbaikan nutrisi bagi ibu hamil dan balita, kemudian dari segi pendidikan dimana kewajiban menyekolahkan anak mereka minimal kewajiban belajar 9 Tahun dan memastikan meningkatnya kapasitas pendapatan keluarga serta memberikan kepastian masa depan anak agar lebih baik dari orang tuanya baik dari segi ekonomi dan terlebih dari segi pendidikannya (Prasiwi, 2018).

Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah Indonesia merekrut pendamping sosial yang mana bertugas untuk memberikan dampingan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) agar mereka bisa menjadi mandiri seperti semboyan dari program PKH yakni "meraih keluarga sejahtera". Untuk lebih jelasnya merujuk pada Undang-undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial yang menyatakan bahwa pendamping PKH yang kemudian disebut juga sebagai pendamping sosial atau pekerja sosial adalah orang yang dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan memahami nilai-nilai praktik pekerja sosial serta telah memiliki sertifikat kompetensi atau telah tersertifikasi sebagai pekerja sosial profesional yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh kementerian sosial. Lebih lanjut dijelaskan pekerja sosial merupakan penyelenggara pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi secara baik dan legal yang mana hal ini berguna sebagai pencegahan disfungsi sosial serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2019)

Menegaskan lebih lanjut maka proses pendampingan dijelaskan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2011 yakni tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan pemerintah untuk menangani Fakir Miskin, pada pasal 1 secara umum dapat dilihat pemaparannya sebagai berikut, pertama mengenai istilah Fakir miskin yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kedua dalam proses penanganan fakir miskin peran yang dilakukan pemerintah adalah melakukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta memfasilitasi dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Ketiga, dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Keempat, sebagai Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia, dimana sebagai pemerintah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Presiden sebagai ujung tombak

utama pembuat kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan. Kelima disebutkan sebagai Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program didaerahnya masing-masing. Dan yang keenam disebut sebagai Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam hal ini adalah Menteri sosial yang menjadi penanggungjawab pelaksana program penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang 13 Tahun 2011, 2011).

Kemudian di dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan penyelenggara pelaksana bantuan sosial. Maka dapat dijelaskan antara lain pertama, fakir miskin mempunyai hak mendapatkan sandang, pangan dan perumahan yang memadai yang mana ini adalah merupakan kebutuhan primer bagi mereka. Kedua, memperoleh pelayanan kesehatan. Sudah barang tentu bahwa kesehatan itu merupakan modal utama bagi siapa pun juga, dalam hal ini pemerintah memberikan Fasilitas dan jaminan sosial bukan hanya bagi yang kaya namun juga bagi Fakir miskin. Ketiga, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. Pendidikan minimal pendidikan 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah adalah dengan diadakannya beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan juga yang berprestasi dengan tujuan pemerataan pendidikan bagi setiap masyarakat. Keempat, mereka berhak mendapat perlindungan sosial untuk membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri mereka dan keluarganya sesuai dengan karakter dan budaya mereka sendiri. artinya, pengembangan potensi diri adalah harus bagi setiap orang dan pemerintah harus mendukung hal ini, ini menjadi titik berat dalam artikel ini yakni dengan pengembangan diri diharapkan masyarakat miskin mampu menjadi masyarakat yang produktif dan tidak lagi mengandalkan budaya "*Berpangku tangan*" tetapi dengan bimbingan mereka bisa menjadi Mandiri. Kelima, berhak mendapat pelayanan sosial melalui program jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dalam mengembangkan serta memberdayakan potensi yang ada pada diri mereka dan keluarganya. Artinya mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak ada istilah membeda-bedakan, karena proses pelayanan haruslah berasarkan pada keadilan bukan strata sosial. Keenam, berhak mendapat kehidupan yang layak dalam hal sandang, pangan dan

perumahan. Ketujuh, berhak mendapat pergaulan dan lingkungan sehat. Tempat tinggal yang layak baik secara fisiknya terlebih kepada pola kehidupan masyarakatnya. Kedelapan, berhak mendapatkan kesempatan kerja dan berusaha yang mana hal ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan yang berkesinambungan. Artinya, dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan akan menjadi jaminan keberlangsungan hidup untuk mereka dan keluarganya (Adi Fahrudin, 2018).

Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Fakir miskin dan ini akan menjadikan mereka lebih baik dalam menjalani kehidupannya, tanggung jawab tersebut antara lain, waspada dari ancaman yang bisa merusak diri dan keluarga dari ancaman yang bersifat mengganggu kesehatan jasmani dan rohani, kehidupan dan penghidupan serta yang paling parah dapat merusak ekonomi diri dan keluarga (Haris et al., 2023). Artinya menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk menjaga diri sendiri agar tidak terlibat kepada hal yang akan merugikan diri sendiri terlebih kepada merugikan keluarga dan orang lain. Kedua, menumbuhkan sikap peduli kepada sesama dan menjaga pertahanan nasional atau ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kita hidup ditengah-tengah masyarakat harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan menghindarkan diri dan keluarga dari bersikap apatis dan tidak peduli kepada lingkungan sekitar. Ketiga, menggali potensi diri untuk menciptakan ekonomi mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan selalu ikut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas keluarga dan penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu fungsi pekerja sosial adalah melayani sebagai pendamping masyarakat. Pendamping sosial adalah bentuk aksi sosial yang melibatkan pendampingan masyarakat dalam rangka terlibat dalam perencanaan dan upaya kolektif untuk mengatasi masalah sosial. Pekerja sosial menangani kebutuhan sosial berdasarkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia bagi mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan berkembang dan berkembang melalui interaksi antara komunitas lokal, pekerja sosial, dan kekuatan eksternal. Interaksi ini dipandu oleh dorongan kualitatif dan perspektif profesional, memungkinkan pekerja sosial untuk memenuhi peran mereka sebagai teman sosial. Dalam komunitas miskin, persahabatan

sosial sering diberikan kepada kelompok rentan yang menghadapi tantangan baik secara internal maupun eksternal. Teman sosial yang ditekankan adalah mampu menjadi seorang sahabat yang selalu menekankan pada sikap memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka dan juga berusaha memanfaatkan apa saja yang ada disekitar mereka untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga kesehatan, pendidikan dan ekonomi mereka mampu meningkat dan mencapai taraf sejahtera dan mampu meneruskan estapet motivasi ini kepada keluarga dan lingkungannya juga. Estapet motivasi diharapkan mampu terus berlanjut bahkan bukan hanya bagi keluarga tapi kepada masyarakat sekitar sehingga dalam mencapai keberhasilan dapat dirasakan oleh semua orang atau masyarakat luas. Artinya kerja keras dan kerja cerdas dari pendamping dapat terus berjalan dan akhirnya mampu mewujudkan masyarakat yang benar benar sejahtera.

Dalam pelaksanaan PKH, pendamping merupakan kunci utama yang memainkan peran vital dalam keberhasilan program. Pendamping sosial PKH adalah individu yang terdaftar dan dikontrak oleh Kementerian Sosial untuk memberikan pemberdayaan sosial yang di tempatkan di kelurahan atau desa yang berdomisili sesuai dengan kecamatan masing-masing dengan tujuan agar mereka lebih kenal kondisi kebutuhan masyarakatnya atau dengan kata lain mudah memberikan pemberdayaan dikarenakan sudah kenal betul dengan situasi dan kondisi masyarakat tempat tinggalnya. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh keahlian dibidang ilmu kesejahteraan sosial, artinya seorang pendamping harus memiliki ilmu dan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan kesejahteraan sosial dan terlebih lagi adalah jika mampu mengedepankan sikap sosial dalam bekerja dan menjalankan tugas pendampingan kepada masyarakat. Mereka yang memiliki pendidikan Sarjana atau diploma di bidang sosial lebih utamakan, terutama mereka yang telah menerima pelatihan di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial, memiliki pengalaman dalam praktik pekerjaan sosial atau layanan kesejahteraan sosial, dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin dan fungsi pendampingan Sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial maka dapat diartikan bahwa pendampingan sosial adalah proses yang melibatkan pembentukan hubungan sosial antara pendamping dan klien dengan tujuan menyelesaikan masalah, memperkuat dukungan, memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi untuk memenuhi kebutuhan

hidup, serta meningkatkan aksesibilitas klien terhadap layanan sosial dasar, ketenagakerjaan, dan fasilitas publik lainnya. Pelaksanaan pendampingan memperhatikan banyak hal namun menjadi fokus utama adalah mampu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan memanfaatkan bantuan semaksimal mungkin sehingga mampu menjadi masyarakat mandiri dan berdikari sendiri. Dalam konteks ini, peran pendamping mewakili tugas atau usaha yang dilakukan oleh seorang individu yang bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan berbagai lembaga terkait, dan sangat diperlukan untuk pembangunan bagi bangsa dan masyarakat (Rahmawati & Kisworo, 2017).

Dalam perjalanan pendampingan sosial, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dan dilaksanakan dalam pendampingan ini, diantaranya Pertama, pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk membedakan dan memastikan sumber-sumber sosial yang sesuai dengan kondisi masyarakat dampingannya, memberikan arahan dan petunjuk untuk bisa menjalin hubungan sesama dan memfasilitasi untuk bisa melihat dan memanfaatkan sumber yang ada. Kedua, sangat penting bagi pekerja untuk secara konsisten membangun hubungan antara konsumen atau klien dan sumbernya, maksudnya adalah menjalin dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat dampingan. Terakhir, pekerja harus kompeten dalam mengevaluasi kemandirian sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan klien, bermaksud mampu memastikan masyarakat dampingan benar-benar bisa memanfaatkan sumber dengan baik dan benar. (Andari, 2020)

Selang berjalannya program selama beberapa tahun terakhir, keluarga yang mendapatkan PKH cenderung menjadi pelaku konsumtif, di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Hal ini terjadi disebabkan karena pola hidup yang cenderung mengutamakan gaya hidup dibandingkan kebutuhan dasarnya. Sesuai dengan analisis Ginandjar tentang kemiskinan, sumber-sumber menunjukkan bahwa kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Menjawab dari pernyataan ini maka dapat dilihat dalam penjelasan berikut. Kemiskinan kultural berkaitan dengan pola pikir dan perilaku individu atau komunitas yang dihasilkan dari cara hidup dan kebiasaan, kurang peduli dengan kondisi bahkan berikap biasa atau tidak peduli dengan kemiskinan yang mereka hadapi. Orang-orang seperti itu tidak cukup termotivasi untuk meningkatkan standar hidup mereka, yang mengakibatkan tingkat pendapatan rendah yang diukur dengan standar yang diterima secara umum. Tidak ada semangat dan motivasi untuk berubah dan

melakukan perbaikan kondisi hidup atau dengan kata lain bersikap pasrah dengan keadaan yang ada. Di sisi lain, kemiskinan struktural sebagian besar disebabkan oleh pembangunan yang tidak seimbang, yang mengarah pada distribusi hasilnya yang tidak adil. Perkembangan yang tidak merata ini berkontribusi pada kesenjangan dalam menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya merusak kohesi masyarakat. Yang terjadi seharusnya adalah pembangunan yang merata sesuai dengan porsi pembangunan yang seimbang yang menjangkau kepada seluruh masyarakat dan daerah (Prasiwi, 2018).

Lubis menjelaskan bahwa fenomena budaya konsumtif tidak lagi beraskan pada pemikiran dan logika rasional, melainkan didorong oleh keinginan yang telah melampaui rasionalitas atau boleh dikatakan sebagai hal yang tidak masuk akal. Selanjutnya, menjadi jelas bahwa ada banyak indikasi yang menunjuk ke arah keberadaan budaya konsumtif. Pertama, individu melakukan pembelian karena daya tarik penawaran khusus. Konsumen tergoda untuk membeli suatu produk ketika disertai dengan penawaran atau promosi khusus. Konsumen terjebak dengan rayuan iklan yang seakan semua terlihat meyakinkan dan menggoda, namun pada kenyataan itu hanyalah rayuan iklan yang mampu menarik mereka untuk membeli tanpa memikirkan diperlukan atau tidak yang mereka beli tersebut. Kedua, individu termotivasi untuk membeli produk semata-mata berdasarkan penampilannya yang menarik. Konsumen dengan mudah menyerah pada godaan untuk memperoleh suatu produk semata-mata karena daya tarik estetika. Keinginan akan hal baru membuat orang senang dengan penampilan tanpa memikirkan kualitas barang yang dibelinya. Ini menunjukkan bahwa motivasi di balik pembelian tersebut terutama didorong oleh daya tarik visual produk. Ketiga, individu membeli produk dengan tujuan hanya untuk menunjang penampilan dan prestise mereka dengan maksud ingin dilihat menarik dan modis didepan orang banyak. Konsumen memiliki kecenderungan yang kuat untuk melakukan pembelian, karena orang dewasa muda, terutama wanita, berusaha untuk membedakan diri mereka melalui pakaian, perawatan, gaya rambut, dan cara lainnya, dengan tujuan memikat perhatian orang lain. Keempat, individu melakukan pembelian semata-mata berdasarkan harga, mengabaikan manfaat yang melekat atau utilitas produk. Konsumen cenderung menunjukkan karakteristik perilaku gaya hidup mewah, mengarahkan mereka untuk menggunakan barang apa pun yang dianggap sebagai lambang kemewahan. Kelima, individu membeli produk untuk mempertahankan simbol status mereka. Konsumen memiliki daya beli yang signifikan

dalam hal pakaian, perawatan, gaya rambut, dan aspek lainnya, memungkinkan mereka untuk menumbuhkan eksklusivitas melalui akuisisi barang-barang mahal, sehingga menyampaikan kesan termasuk dalam kelas sosial yang lebih tinggi. Artinya membeli atas dasar ingin disanjung sebagai orang kaya dan pada akhirnya selalu tergiur dengan barang-barang mewah atas dasar ingin terlihat kaya dan modis. Keenam, individu memakai produk tertentu sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan gambar yang digambarkan oleh panutan mereka dalam iklan. Konsumen cenderung meniru perilaku sosok mereka yang dikagumi, dicontohkan dengan adopsi pakaian dan aksesoris yang sama. Ketujuh, individu melakukan pembelian dengan harga tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Konsumen sangat dipengaruhi untuk mencoba suatu produk, karena mereka percaya bahwa klaim yang diiklankan dapat menanamkan rasa percaya diri. Dengan membeli produk yang mereka anggap meningkatkan penampilan fisik mereka, individu menjadi lebih percaya diri. Kedelapan, individu sering bereksperimen dengan berbagai produk serupa. Konsumen cenderung beralih ke merek yang berbeda dalam kategori produk yang sama, bahkan jika produk sebelumnya belum habis. (Laili, 2022).

Lebih dalam lagi guna melihat sebesar apa pengaruh budaya konsumtif ini bagi masyarakat ada dua Faktor yang mendasarinya yakni internal dan eksternal, pada kasus konsumtif bagi penerima bantuan maka lebih ditekankan pada faktor eksternal atau ingin dilihat orang lain dan mengesampingkan kebutuhan primer. Dalam hal Faktor Internal, kepuasan yang diperoleh dari memberi dikemas dalam Faktor Internal, yang dipengaruhi oleh motivasi, harga diri, pengamatan, proses pembelajaran, dan konsep diri. Motivasi, menjadi dorongan di balik tindakan individu dalam memperoleh atau memanfaatkan layanan. Harga diri, berdampak pada perilaku pembelian, karena individu dengan harga diri rendah cenderung lebih rentan terhadap pengaruh dibandingkan dengan mereka yang memiliki harga diri tinggi. Pengamatan, di mana individu menilai diri mereka sendiri dan orang lain dalam kaitannya dengan suatu produk sebelum melakukan pembelian. Proses pembelajaran, yang mencakup pembelian konsumen dan merupakan serangkaian proses yang dipengaruhi oleh pengalaman seseorang, memainkan peran penting dalam menentukan barang yang akan diperoleh. Kepribadian, menunjukkan pola perilaku individu. Konsep diri, mencakup pikiran, persepsi, dan sikap individu tentang diri sendiri. Beralih ke Faktor Eksternal, ini dipengaruhi oleh budaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan keluarga. Berikut paparkan mengenai empat hal ini:

- a. Budaya adalah produk dari kerja manusia, proses pendidikan, memiliki peraturan atau pola, merupakan bagian integral dari masyarakat, dan menunjukkan kemiripan tertentu sementara juga beragam dan bersatu secara keseluruhan. Ini berarti bahwa individu menjadi terbiasa untuk menampilkan cara hidup mereka ketika mereka harus memprioritaskan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder.
- b. Strata sosial dikategorikan menjadi tiga kelompok yang berbeda, khususnya kelas atas, menengah, dan bawah. Klasifikasi ini didasarkan pada kemakmuran, otoritas, prestise, dan pengetahuan.
- c. Kelompok referensi dilambangkan sebagai kolektif individu yang memberikan pengaruh pada sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Peran kelompok referensi, di antara faktor-faktor lain, terletak pada menentukan produk dan merek yang digunakan sesuai dengan aspirasi grup.
- d. Keluarga, atau lebih tepatnya, unit masyarakat paling dasar yang perilakunya sangat berdampak dan membentuk keputusan pembelian individu. Kebutuhan keluarga yang menjadi faktor utama penentu bagi individu menjadi konsumtif, bahkan kadang hanya untuk memenuhi keinginan semata atau istilahnya memuaskan dahaga lapar mata (Palguna, 2021).

Hukum Engel mendalilkan bahwa ketika pendapatan pribadi menurun, alokasi pendapatan untuk konsumsi makanan meningkat secara proporsional. Sebaliknya, ketika pendapatan meningkat, proporsi pendapatan yang dikhususkan untuk konsumsi makanan berkurang (Fadhli et al., 2021). Engel menyajikan empat kesimpulan yang berasal dari teori yang diusulkan. Secara khusus, kesimpulan pertama menegaskan bahwa ketika pendapatan atau jumlah bantuan meningkat, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan menurun. Intinya, memprioritaskan kebutuhan pangan menjadi tujuan utama ketika meningkatkan jumlah bantuan, meskipun bertentangan dengan kenyataan. Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi pakaian tetap relatif konstan dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pakaian tidak dianggap sebagai kebutuhan penting dalam mendukung kehidupan dan mata pencaharian penerima bantuan. Kesimpulan ketiga menunjukkan bahwa persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran rumah tangga tetap tetap dan tidak terkait dengan tingkat pendapatan. Terakhir, kesimpulan keempat menyatakan bahwa peningkatan pendapatan menghasilkan proporsi pengeluaran yang

lebih tinggi untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, barang-barang mewah, dan tabungan. (Fadhli et al., 2021).

Berdasarkan eksposisi teoretis yang disebutkan di atas, penelitian sebelumnya tentang pendampingan sosial terutama berkonsentrasi pada strategi yang diterapkan oleh Social Companions. Akibatnya, penyelidikan mengenai dampak yang dialami keluarga PKH setelah menerima bantuan sebagian besar telah diabaikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fajar R. Wirasandjaya (2019) di narasiinspirasi.com mengungkapkan bahwa tanggung jawab utama pendampingan PKH meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, perumusan rencana operasional PKH yang komprehensif dalam wilayah pendukung yang ditunjuk. Kedua, penyebaran informasi dan kesadaran tentang PKH kepada berbagai entitas pemerintah di tingkat kecamatan, desa, dan calon KPM, serta masyarakat umum. Ketiga, pembentukan sistem pemetaan dan pengorganisasian kelompok PKH KPM berdasarkan kedekatan geografis. Keempat, pelaksanaan proses bisnis PKH, yang meliputi validasi, distribusi bantuan, verifikasi, update data, rapat bulanan, P2K2, dan KPM Mandiri. Kelima, memastikan KPM menerima bantuan program tambahan, seperti BPNT, KIS, KIP, dan bentuk bantuan sosial lainnya. Keenam, melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi, dan advokasi untuk menghasut perubahan perilaku di kalangan anggota KPM PKH. Ketujuh, menyusun laporan rutin pelaksanaan P2K2 untuk koordinator kabupaten dan Dinas Pelayanan Sosial setempat. Terakhir, secara berkala menyiapkan laporan pelaksanaan PKH untuk koordinator Kabupaten/Kota dan Dinas Pelayanan Sosial untuk kabupaten atau kotamadya terkait. (Fajar R. Wirasandjaya, 2019).

Jika seorang Pendamping sosial hanya fokus pada tugas dasar pendampingan dan mengabaikan tujuan utama program yakni meraih keluarga sejahtera, masalahnya yang muncul adalah ketika KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat) diberikan bantuan akan muncul budaya konsumtif, dalam artian bantuan yang mereka terima habis hanya dalam satu dua hari saja dan terkadang untuk hal yang kurang bermanfaat. Disinilah peran penting dari hadirnya pendamping Sosial, dalam hal ini peran yang diambil dari pendamping sosial di kecamatan Mandau adalah kembali merujuk dari tugas dan fungsi pokok sebagai pendamping yakni memfokuskan pada poin keenam yang intinya merubah perilaku masyarakat. Dan juga pada Poin ketujuh yakni melakukan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) berdasarkan ketetapan yang sudah diarahkan oleh

kementerian sosial dan pelaksanaannya pun sudah ditentukan berdasarkan modul-modul yang sudah disusun dan dipelajari.

Kemudian untuk mendukung pernyataan ini dilakukan juga pemberian modal usaha oleh kementerian sosial melalui dinas terkait, dimana sebagian kecil masyarakat penerima bantuan ini diarahkan membuat kelompok dan kemudian dibantu modal usaha dan dibimbing oleh tenaga ahli sehingga bisa mengembangkan diri dan membantu perekonomiannya. Kelompok usaha, seperti yang dipresentasikan oleh Staf Ahli Menteri Perubahan dan Dinamika Sosif, Adhy Karyono, dipandang sebagai berikut: program yang dikenal sebagai program kewirausahaan sosial (Prokus) Wisuda KPM PKH yang dipilih, akan diberikan bimbingan dan dukungan sosial, serta insentif berupa modal usaha sebesar Rp 3,5 juta per KPM, untuk lebih meningkatkan usaha bisnis mereka. Penting untuk dicatat bahwa kelulusan dapat terjadi secara organik, menunjukkan bahwa bantuan tidak akan lagi diberikan karena tidak adanya tanggungan. Jenis-jenis bisnis yang memenuhi syarat untuk menerima modal kewirausahaan sosial termasuk toko kelontong, perusahaan kuliner, pedagang, penjahit, usaha pertanian, dan peternak (Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2021).

Atas dasar permasalahan yang terjadi ini lah maka artikel ini dibuat yakni ingin mendalami bagaimana masyarakat yang mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH) itu bisa menjadi masyarakat yang produktif dengan memanfaatkan bantuan yang di dapatkannya dan melihat bagaimana peranan dari pendamping sosial untuk mengubah budaya konsumtif menuju budaya produktif.

## **Metode**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis yang diperoleh dari hasil wawancara secara lisan, yang berkaitan dengan individu yang dapat diamati dan berkaitan dengan perilaku mereka. Pendekatan yang disebutkan di atas berpusat pada pemahaman komprehensif konteks dan individu yang bersangkutan. Tujuan melakukan penelitian kualitatif terletak pada keinginan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat dengan mudah dikuantifikasi, yang memiliki kualitas deskriptif. Contoh fenomena tersebut termasuk proses langkah demi langkah dari suatu tugas, berbagai gagasan

konseptual, serta atribut barang dan jasa. Studi khusus ini menekankan pemanfaatan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, meliputi pemeriksaan sumber media atau literasi literasi yang sudah ada dari penelitian sebelumnya, serta penerapan metode wawancara (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021).

Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling yakni penentuan sampel dengan maksud dan tujuan tertentu, artinya sampel diambil berdasarkan kebutuhan data yang ingin diperoleh atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Sampel dipilih karena dianggap paling memahami dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah pendamping PKH kecamatan Mandau berjumlah 4 orang dan TKSK kecamatan mandau berjumlah 1 orang. Pelaksanaan penelitian dilakukan di kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis provinsi Riau dimulai Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis induktif yakni mengumpulkan sebanyak-banyaknya data baik dari hasil observasi, wawancara maupun dari sumber lain kemudian memberikan kesimpulan dari data yang diperoleh dengan menerapkan ciri tertentu atau kesimpulan sesuai kategori tertentu. Lebih lanjut siuraikan oleh Miles dan huberman dalam menganalisa menggunakan analisa ini haruslah dilakukan berkelanjutan sampai kepada titik jenuh sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan tujuan utama dari penelitian. maka langkah yang dilakukan adalah reduction data, display data dan tahap terakhir adalah conclusion drawing atau menyimpulkan dengan menggambarkan data secara detail (Sugiyono, 2019).

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan dua cara yakni melalui wawancara dan dokumentasi. Menggunakan wawancara berarti melaksanakan percakapan baik menggunakan pertanyaan secara terbuka maupun tertutup kepada orang yang dianggap ampu menjawab secara detail mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan adalah mencari jawaban secara mendalam kepada yang diwancarai guna menghasilkan data yang diinginkan sampai kepada titik jenuh. Dilakuakn dengan langsung bertatap muka kepada informan kemudian menyakan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian sehingga didapatn jawaban yang paling tepat (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data berikutnya peneliti menggunakan teknik dokumentasi dimana dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data kemudian menganalisa dokumen berupa

tulisan, gambar dan media elektronik atau berita online. Metode ini menjadi pelengkap dari hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh benar-benar lengkap. Data yang dihasilkan akan lebih diakui jika mampu memberikan data dukung yang lengkap terutama yang langsung bersumber dari informan langsung (Nana Syaodih Sukmadinata, 2013).

## **Hasil Dan Pembahasan**

Dalam pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH untuk mengurangi budaya konsumtif menuju kepada budaya produktif bagi penerima bantuan dapat dilaksanakan dengan dua cara yang akan dipaparkan sebagai berikut :

### **1. Melaksanakan Kegiatan Rutin dengan Keluarga**

Mencapai keberhasilan menjadikan keluarga penerima manfaat PKH tidak lagi budaya konsumtifnya tinggi adalah merupakan peran utama dari proses pendampingan yang dilakukan pendamping sosial PKH, dimana dalam hal ini dijelaskan oleh Fachri Setiadi sebagai koordinator kecamatan bahwa disetiap bulannya pendamping PKH diwajibkan melakukan pertemuan kelompok yang dimana salah satu agendanya adalah menyampaikan modul mengenai pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha (PKPU), ini merupakan kewajiban bagi pendamping untuk menyampaikan materi ini kepada KPM agar mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin dan terlebih bisa menyisihkan sedikit untuk modal usaha yang nantinya akan berguna untuk memperbaiki kehidupan mereka agar tidak lagi tergantung kepada bantuan sosial khususnya bantuan PKH. Lanjutnya lebih rinci bahwa pertemuan ini menjadi salah satu kewajiban bagi KPM atau keluarga penerima manfaat untuk hadir dan berperan aktif dalam pertemuan tersebut yang mana pada pertemuan ini dibahas berbagai macam hal yang akan mengarahkan kepada kemandirian mereka dan kesejahteraan diri dan keluarga mereka (Fachri Setiadi : Wawancara September 2023).



**Gambar 1:** Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga di Desa Bathin Betuah



**Gambar 1:** Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga di Desa Harapan Baru

. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pertemuan rutin ini disampaikan oleh Gustina Sundari bahwa pertemuan ini selain membahas tentang isu-isu permasalahan kebijakan dari perkembangan program maka yang terpenting adalah proses menyadarkan masyarakat agar mereka tidak lagi berpangku tangan kepada bantuan pemerintah dan bisa minimal mengembangkan usaha dalam keluarganya. Lanjutnya terlebih pengurus dalam bantuan sosial PKH ini adalah ibu-ibu yang mana pemerintah menaruh kepercayaan lebih kepada ibu-ibu bisa mengatur keuangan lebih baik dibandingkan bapak-bapak. (Gustina Sundari : Wawancara Agustus 2023)

Pertemuan kelompok bulanan yang dilakukan banyak sekali dampak manfaatnya, ini dijelaskan oleh Veni Febrianty Taufik, beliau menjelaskan bahwa selain tentunya menjadi bahan laporan bagi pendamping sosial pertemuan ini memiliki banyak dampak positif bagi penerima bantuan. Diantara manfaatnya adalah dengan berkumpul maka

tercipta peluang usaha bersama atas dasar kesamaan kondisi ekonomi, ini terbukti dengan terbentuknya salah satu usaha mereka yakni pembuatan kerajinan dari lidi sawit yang kemudian dipasarkan melalui kelurahan di even-even tertentu salah satunya di even MTQ baik tingkat kelurahan maupun tingkat kabupaten( Veni Febrianty Taufik : wawancara September 2023)

Fuji Astuti menjelaskan bahwa untuk merubah budaya ini sangat sulit, dimana memberikan pemahaman bahwa meutamakan kebutuhan diatas keinginan itu merupakan hal utama yang harus ditanamkan kepada KPM dan terlebih lagi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan seperti semboyan PKH yakni meraih keluarga sejahtera yang artinya melalui pendidikan dan kesehatan anak-anak dari KPM PKH tidak boleh miskin lagi, harus berubah dan mencoba berusaha salah satunya menyisihkan bantuan untuk modal usaha (Fuji Astuti : wawancara September 2023)

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan pendamping memiliki dampak yang besar pada berkurangnya budaya konsumtif dengan ditandai KPM mampu menyisihkan sedikit uang bantuannya untuk modal usaha bukan hanya habis untuk kebutuhan makan saja. Menyisihkan sedikit bantuan untuk digunakan sebagai modal usaha dan tentunya sesuai dengan arahan pada modul P2K2 yang pendamping sampaikan setiap pertemuan dengan tujuan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraan dan membantu ekonomi keluarganya.

## **2. Mengikuti Pelatihan-Pelatihan khususnya pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Salah satu strategi pemerintah melalui pendamping sosial adalah memberikan pelatihan kepada pendamping sosial yang dimana kemudian diteruskan kepada KPM seperti program KUBE tingkat kabupaten, provinsi dan kementerian. Dan program terbaru dari pemerintah adalah bantuan Pena (Pahlawan ekonomi Nasional), untuk ini dijelaskan melalui wawancara dengan Gustina Sundari, KPM bisa membentuk usaha mandiri dengan modal bersama atau dengan membentuk kelompok kemudian mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten untuk diberikan modal usaha bersama. Lebih lanjut mengenai usaha ini, beliau menyampaikan ada yang lebih fokus lagi yakni pemberian modal usaha kepada KPM yang telah Graduasi secara alami (tidak

ada komponen lagi) sesuai dengan ketentuan kementerian, ini sangat mendukung masyarakat tersebut agar tetap berdaya sehingga mereka bisa tetap melanjutkan hidupnya meskipun tidak lagi menerima bantuan rutin. Seperti bantuan usaha membuat yang diterima Ibu Aliatina Mersi dimana pelatihan dilakukan online oleh Balai pelatihan kementerian sosial selama empat hari dan diberikan modal. Untuk pemasaran dilakukan di even-even pariwisata tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Selain itu, proses bimbingan tetap dilakukan agar modal usaha yang diberikan bisa semakin berkembang dan tidak hanya habis pakai saja. (Gustina Sundari :wawancara Oktober 2023).



**Gambar 2:** Usaha batik Ibu Aliata Mersi

Fuji Astuti kembali mempertegas dalam wawancara yang dilakukan bahwa pelatihan yang dilakukan balai diklat kementerian sosial melalui daring sedikit banyaknya memberikan dampak positif bagi KPM untuk bisa mengembangkan usahanya dan ini tetap diawasi oleh pendamping sosial agar usahanya tetap berjalan dan tidak berhenti. Salah satu KPM dari Fuji Astuti yang mendapatkan bantuan modal usaha pahlawan ekonomi nasional (PENA) adalah ibu Wahyuni yang beralamat di kelurahan Duri Timur kecamatan Mandau, ibu Wahyuni mendapat bantuan modal usaha sekaligus pelatihan berupa jualan makanan dan tempat ibu Wahyuni berjualan adalah di sekolah SMPN 3 Mandau yang tentunya memiliki prospek yang baik kedepannya. (Fuji Astuti : Wawancara Oktober 2023).



**Gambar 3:** Usaha jualan makanan Ibu Wahyuni, modal serta pelatihannya dari bimbingan balai pelatihan kementerian sosial

Selain program Pena yang merupakan program dari kementerian, program KUBE juga menjadi salah satu cara yang pemerintah lakukan, ini dijelaskan oleh Devi Herawati selaku Pendamping TKSK bahwa mereka yang dapat bantuan khususnya yang terdata di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) bisa mengajukan diri untuk menerima bantuan usaha bersama dengan syarat membentuk kelompok sebanyak 10 orang yang kemudian membuat proposal kepada pemerintah daerah melalui dinas sosial untuk mengajukan modal usaha. Modal ini bersifat hibah yakni habis pakai, yang dituntut dari mereka adalah walaupun sifatnya dana habis pakai, tetapi ada proses pendampingan dimana tetap ada pengecekan guna untuk melihat perkembangan usaha tersebut. Konsekwensinya jika tidak berhasil maka akan diberikan sanksi berupa teguran dan tidak diterima pengajuan kembali artinya namanya akan di blacklist dari daftar penerima dan Usaha KUBE. (Devi Herawati :wawancara Oktober 2023)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan tidak perlu diragukan lagi, dimana KPM diberikan modal usaha selain dari modal yang mereka siapkan sendiri,, tetapi semua ini tidak terlepas dari peran pendamping sosial yang harus tetap selalu memotivasi bahwa budaya konsumtif harus dirubah menjadi budaya produktif yang pada akhirnya menciptakan masyarakat mandiri dan tidak lagi ketergantungan terhadap bantaun pemerintah.

Paparan hasil di atas menunjukkan bahwa ddalam dua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH yakni mengenai melaksanakan pertemuan keluarga dan pelatihan maka dapat merubah gaya masyarakat yang dari konsumtif menjadi produktif. Hal ini semakin menarik untuk dibicarakan lebih lanjut, mengapa dua hal itu dapat merubah gaya masyarakat. Dalam kajian pemberdayaan, berubahnya pola

masyarakat disebabkan adanya proses terjadinya penyadaran yakni memberikan motivasi kepada penerima bantuan untuk berkarya yang artinya tidak hanya berpangku tangan dengan terus menerima bantuan yang kemudian bantuan tersebut hanya untuk konsumtif tetap lebih kepada menjadikan bantuan tersebut disisihkan untuk modal usaha dan juga berpartisipasi aktif untuk mencari sumber bantuan dana usaha dari kementerian pusat maupun daerah melalui pendamping sosial yang bertugas.

Pekerja sosial memiliki fungsi memfasilitasi individu untuk beroperasi secara optimal dalam peran dan status sosial yang ditunjuk. Ini memerlukan kemampuan pekerja sosial untuk membantu individu dalam mencapai fungsi optimal dalam institusi sosial. Tujuan pertama adalah untuk mengaktualisasikan potensi produktivitas dan realisasi diri, baik dalam individu maupun lingkungan sosial mereka, untuk mendorong munculnya mode fungsi sosial yang inovatif dan tanpa pamrih, serta rasa keakraban komunal. Interaksi yang terjalin diharapkan benar benar mampu menciptakan suasana keakraban yang baik tanpa adanya keinginan timbal balik atau keuntungan semata. Tujuan kedua melibatkan diri secara penuh dalam usaha membantu individu dalam mengejar kehidupan yang mapan dan baik serta menggapai standar hidup normatif yang lebih tinggi dan lebih memuaskan sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan yang mana selama ini masih terhambat atau tidak mencukupi. Upaya ini dicapai dengan memanfaatkan secara efektif sumber daya yang disediakan oleh kelompok dan institusi sosial yang mapan, serta dengan mengatasi hambatan dan membangun koneksi sosial. Tujuan ketiga adalah bertindak sebagai pengganti keluarga dan komunitas, memberikan berbagai bentuk bantuan yang mendukung, substitutif, protektif, dan preventif kepada individu dan keluarga. Artinya sebagai pekerja sosial harus melibatkan diri dalam pemecahan masalah yang lebih proaktif bahkan bersifat memaksa agar terjadi perubahan yang baik kepada masyarakat dampingan. Terakhir, pekerja sosial berusaha untuk mengintegrasikan individu satu sama lain, menengahi di antara mereka, dan memfasilitasi integrasi individu dengan lingkungan sosial mereka, terutama dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia. Integrasi yang dimaksud adalah memadukan semua sumber yang ada terutama individu dengan lingkungan sehingga mampu mengenali potensi diri mereka (Andari, 2020)

Pendamping sosial berfungsi sebagai katalis untuk transformasi sosial, menawarkan sarana untuk mengatasi masalah saat ini. Akibatnya, pendampingan sosial

dapat dianggap sebagai pertukaran dinamis antara komunitas kurang mampu dan pekerja sosial, yang bertujuan untuk secara kolektif menghadapi beragam tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi perumusan inisiatif sosial ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup, mobilisasi sumber daya lokal, penyelesaian masalah sosial, fasilitasi akses ke kebutuhan penting, dan pembentukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Hadirnya pendamping sosial dengan memberikan pendampingan merupakan faktor penting dalam menentukan berhasilnya program pengentasan kemiskinan. (Andari, 2020).

Bagi pendamping sosial di lapangan, penyediaan kegiatan pendampingan sosial merupakan tugas mendasar dalam upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien atau penerima manfaat. Ada empat usaha penting yang dapat dilaksanakan selama fase awal pendampingan sosial, di mana pendamping harus memiliki kapasitas untuk menawarkan motivasi. Dalam prosedur motivasi ini, diharapkan klien memahami pentingnya persatuan, interaksi sosial, dan pemberdayaan melalui pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Klien harus didorong untuk membentuk kelompok, yang berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan vital untuk mengatur dan melaksanakan inisiatif pengembangan masyarakat di desa atau daerah setempat. Selanjutnya, kelompok harus termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan menggunakan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri. Kedua, penting untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan keterampilan. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dasar, kampanye imunisasi, tindakan korektif, dan praktik sanitasi. Keterampilan kejuruan dapat dikembangkan melalui pendekatan partisipatif. Pengetahuan lokal, biasanya diperoleh melalui pengalaman, dapat digabungkan dengan pengetahuan eksternal. Bentuk pelatihan ini dapat membantu klien dalam membangun sarana mata pencaharian mereka sendiri atau meningkatkan keterampilan mereka untuk mengamankan pekerjaan di luar lingkungan terdekat mereka. Ketiga, teman sosial harus memiliki keterampilan manajemen diri yang mahir dan memberikan pengetahuan ini kepada klien. Dalam skenario ini, kelompok harus memiliki otonomi untuk memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, meliputi mengadakan pertemuan, memelihara catatan dan laporan, mengelola tabungan dan kredit, menyelesaikan konflik, dan membina kepemilikan masyarakat. Awalnya, pendamping menawarkan bimbingan dan melakukan sesi pembekalan untuk

memfasilitasi organisasi kegiatan ini. Setelah itu, kelompok diberikan wewenang penuh untuk mengelola upaya ini secara mandiri, sambil tetap menerima bimbingan dari pendamping sosial, secara alami. Terakhir, pendamping harus memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Ini memerlukan akumulasi sumber daya individu melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela, dengan tujuan membangun modal sosial. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap individu memiliki sumber dayanya sendiri, yang, ketika dikumpulkan, dapat sangat meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Pengembangan sistem pertumbuhan penduduk, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua anggota. Tindakan ini mampu memberikan jaminan kepada kepemilikan serta pengelolaan yang terus terlaksana..(Susantyo et al., 2018)

Mengapa proses pendampingan dalam merubah Budaya konsumtif menjadi produktif ini berhasil? Menjawab pertanyaan ini maka segala sesuatu ini tentunya karena adanya peran aktif dari pendamping sosial selalu rutin melakukan pendampingan kepada KPM melalui berbagai macam model pendampingan. Kemudian seperti dijelaskan dalam wawancara bersama pendamping bahwa menjadi tanggungjawab bagi mereka melakukan pertemuan karena ada modul khusus untuk menciptakan budaya produktif ini dan juga dari dinas atau bahkan kementerian sendiri banyak memberikan arahan berupa dana segar bagi KPM untuk merubah pola hidup mereka yang selama ini hanya menggantungkan hidup kepada bantuan pemerintah, kini mereka bisa menjadi produktif dengan tentunya tetap dilakukan proses pendampingan sehingga mereka atau KPM ini benar benar bisa mandiri dan memiliki produktifitas yang tinggi.

Keberhasilan dari pelaksanaan pendampingan ini tidak terlepas dari kemampuan dari seorang pendamping yang bertugas sesuai dengan aturan dan arahan yang berlaku, bahkan menjadi seorang pendamping harus dituntut profesionalisme artinya selain dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat pekerja sosial juga harus menanamkan dalam jiwa bahwa pekerja sosial pekerjaan yang membutuhkan niat dan ketulusan hati serta keikhlasan yang mendalam dan juga kesabaran serta waktu yang banyak tersita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya kepada KPM dampungannya. Totalitas dalam bekerja sangat diperlukan agar apa yang menjadi tujuan utama dari setiap program yang dibuat pemerintah mampu menjangkau secara penuh kepada masyarakat terutama pada program keluarga harapan yakni meraih keluarga sejahtera baik dalam

ekonomi, pendidikan, kesehatan dan terutama kepada generasi mereka yang akan datang tidak lagi berpangku tangan dan hanya berharap kepada bantuan tapi mampu memberikan bantuan kepada orang lain.

## **Simpulan**

Peran penting dari seorang pekerja sosial adalah melaksanakan pendampingan yang mampu mengarahkan kepada pembangunan kesejahteraan melalui pemberdayaan Masyarakat. Pendekatan yang dilakukan bisa melalui pendekatan ekonomi lokal, dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengembangkan potensi yang ada pada dirinya masing-masing dan mengarahkan mereka kepada mencari solusi terbaik untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Tentunya yang tidak kalah penting adalah kemampuan seorang pendamping sosial yang dituntut lebih aktif, artinya pendamping sosial yang telah tersertifikasi melalui pelatihan yang telah dibuat oleh kementerian sosial. Kemudian menjadi kewajiban untuk pendamping sosial untuk melanjutkan estapet pelatihan yang didapatkannya kepada KPM dampingannya sehingga terciptalah budaya produktif.

Budaya konsumtif yang ada pada KPM menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping sosial untuk merubahnya. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka untuk merubah pola hidup konsumtif kepada produktif dilakukan dengan dua cara yakni pertama dengan rutin melakukan pertemuan yang disebut pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2), dalam pertemuan yang dilaksanakan harus mengacu pada modul diantaranya modul pengelolaan keuangan pengelolaan usaha (PKPU) yang isinya adalah bagaimana mengelola keuangan dengan rutin menabung, menyisihkan uang bantuan untuk modal usaha dan menjalin kerjasama kelompok membuat usaha bersama. Kedua, kementerian sosial melalui pendamping sosial memberikan peluang pelatihan kelompok usaha bersama (KUBE) dan usaha mandiri bagi keluarga penerima manfaat (KPM) baik yang masih aktif dan terlebih kepada mereka yang sudah pada posisi graduasi mandiri atau tidak lagi memiliki komponen sebagai syarat khusus program PKH. Dimana KPM melalui pendamping PKH diarahkan untuk mendapatkan pelatihan misalnya Pena (pahlawan ekonomi nasional), Usaha kelompok modal bersama dan membuat proposal kepada pemerintah daerah sebanyak 10 orang dan kemudian dilatih dan diberikan modal serta dibimbing untuk menjadi mandiri dan produktif.

## **Referensi**

- Adi Fahrudin. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Nurul Falah Atif, Ed.; edisi keti). Refika Aditama.
- Ahmad Naufal Dzulfaroh, R. S. N. (2021). *Bantuan Modal Usaha bagi PKH Sebesar Rp 3,5 Juta, Simak Syaratnya*. Bantuan Modal Usaha Bagi PKH Sebesar Rp 3,5 Juta, Simak Syaratnya Klik Untuk Baca: [https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/073000765/Bantuan-Modal-Usaha-Bagi-Pkh-Sebesar-Rp-3-5-Juta-Simak-Syaratnya-?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=](https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/073000765/Bantuan-Modal-Usaha-Bagi-Pkh-Sebesar-Rp-3-5-Juta-Simak-Syaratnya-?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=).
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (2021). *metode penelitian kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. (2021). Analisis Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Pada Masapandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(3), 110–117.
- Fajar R. Wirasandjaya. (2019). *Tugas pendamping sosial pkh*. <https://www.narasiinspirasi.com/2019/11/Tugas-Pendamping-Sosial-Pkh-Pendamping.html>.
- Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 46–63.
- Haris, M., Hendrayani, M., & Nurhijjah, H. (2023). PEMBERDAYAAN KELUARGA LANSIA MELALUI PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DI KAMPAR. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 1–8.
- Laili, iftitah nurul. (2022). *Memahami Arti Konsumtif, Indikator, Faktor, dan Dampaknya Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Memahami Arti Konsumtif, Indikator, Faktor, dan Dampaknya”*, Penulis: Iftitah Nurul Laily Editor: Safrezi.
- Nana Syaodih sukmadinata. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.

- Palguna, N. A. (2021). *Pengaruh Budaya Kerja Dan Perilaku Produktif Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Bali Cabang Tabanan. 1(4), 1292–1300.*
- Prasiwi, P. (2018). *Gaya Hidup Konsumtif Penerima Bantuan Pkh (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung). Paradigma, 1–8.*
- Presiden Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No 14 Republik Indonesia tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. 006424.*
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>*
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Alfabet.
- Susantyo, B., Agency, I., Habibullah, H., Indonesia, I. A., Irmayani, N. R., Suradi, S., & Agency, I. (2018). *Optimalisasi Peran dan (Issue January).*
- Undang-Undang 13 Tahun 2011. (2011). *Undang-Undang 13 TAHUN 2011. Sistem Otot, 11(2), 1–21.*